

## ABSTRAK

Sektor pertanian sebagai pondasi dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pembangunan ekonomi di Indonesia, maka diperlukan upaya peningkatan produktivitas pertanian. Pupuk merupakan komponen penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Peredaran pupuk tidak terdaftar sangat berdampak terhadap penurunan produktivitas pertanian. Kasus pupuk tidak terdaftar terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Penegakan hukum peredaran pupuk tidak terdaftar berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan untuk mengkaji kendala penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah dengan sumber data primer dalam bentuk wawancara dan pengamatan langsung. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis rumusan masalah menggunakan teori efektivitas hukum Donald Black dan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman.

Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah belum efektif, karena masih marak beredar pupuk tidak terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kedua, kendala dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dilihat dari faktor struktur hukum (*legal structure*) yakni belum adanya PPNS di Kabupaten/Kota sedangkan dilihat budaya hukum (*legal culture*) yakni masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban peredaran pupuk tidak terdaftar dan belum efektifnya pelaksanaan pengawasan pupuk oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pupuk, Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar

## ABSTRACT

*The agricultural sector is the foundation in maintaining food security and stability of economic development in Indonesia, so efforts are needed to increase agricultural productivity. Fertilizer is an important component to increase agricultural productivity. The circulation of unregistered fertilizers has a significant impact on reducing agricultural productivity. Unregistered fertilizer cases occurred in several areas in Central Java. Law enforcement of unregistered fertilizer circulation is based on Article 73 and Article 122 of Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation System.*

*This study aims to determine the effectiveness of law enforcement of unregistered fertilizer circulation in the POLDA JAWA TENGAH jurisdiction, and to determine the obstacles to law enforcement of unregistered fertilizer circulation in the POLDA JAWA TENGAH jurisdiction.*

*The method used in this research is empirical juridical legal research with qualitative analysis. The research was conducted in the jurisdiction of Central Java Province with primary data sources in the form of interviews and direct observation. While secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To analyze the problem formulation using Donald Black's legal effectiveness theory and Lawrence Meir Friedman's legal system theory.*

*The research results are as follows: First, the effectiveness of law enforcement of unregistered fertilizer circulation in the POLDA JAWA TENGAH jurisdiction has not been effective, because unregistered fertilizers are still rampant in the Central Java Province. Second, the obstacles in law enforcement of unregistered fertilizer circulation in the POLDA JAWA TENGAH jurisdiction are seen from the legal structure factor, namely the absence of PPNS in the Regency / City while seen from the legal culture, namely the low legal awareness of the people who are victims of the circulation of unregistered fertilizers and the ineffective implementation of fertilizer supervision by the Fertilizer and Pesticide Supervision Commission (KP3) Regency / City of Central Java Province.*

*Keywords: Law Enforcement, Fertilizer, Unregistered Fertilizer Circulation*